

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam pasal 18 Undang-undang dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”*. Pasal tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang berarti sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan daerah merupakan bagian meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. *“Pembagian daerah integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam*

sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang berarti sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain: berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, untuk tujuan tersebut Pemerintah Daerah harus memiliki kekuatan untuk menggali potensi sumber-sumber PAD dan Pemerintah harus mentransfer sebagai pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan Pemerintah Daerah. Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki

sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya. Sektor pariwisata semakin dipersiapkan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa pembangunan.

Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia dengan luas wilayah 35.377,76 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa (Data SIAK Jawa Barat 2015). Setelah melewati berbagai dinamika, hingga terjadi pemekaran di beberapa wilayah sat ini terdapat 26 Kabupaten dan Kota, 625 Kecamatan serta 5.899 Desa atau kelurahan. Melihat data tersebut tentunya Jawa Barat memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan dari berbagai sektor.

Sudah tidak diragukan lagi provinsi yang terletak paling barat di Pulau Jawa, memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun (domestik maupun mancanegara) mengunjungi atau bahkan sekedar singgah belajar, mencari nafkah, namun akan terasa berat bagi mereka untuk meninggalkan tanah Parahyangan ini. Bayangkan saja betapa bahagianya di saat akhir pekan tiba, wajah-wajah para wisatawan lokal yang berdatangan ke berbagai lokasi wisata di Jawa Barat. Sebagai contoh adalah wilayah pusat di Jawa Barat seperti Kota Bandung, kota yang memiliki potensi ekonomi terutama dari sektor pariwisata mulai dari pakaian dan kuliner. Kemudian Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan wilayah seuknya seperti Cikole, Cihideung, dan sebagainya. Di sebelah selatan Kota Bandung adalah wilayah Kabupaten Bandung, yang juga terkenal dengan berbagai obyek wisata, mulai dari kuliner hingga agrowisata.

Wilayah-wilayah tersebut hanyalah wilayah yang secara georgafis berada di pusat Jawa Barat, namun jika dipaparkan berdasarkan wilayah Jawa Barat utara, selatan, barat dan timur, obyek wisata yang dimiliki berjumlah ratusan bahkan lebih. Jadi obyek wisata di Jawa Barat bukan Gunung Tangkuban Perahu, Pantai Bayah, Pantai Ujung Genteng, Pantai Pangandaran, Pantai Batu Karas, ataupun Pantai Ranca Buaya dan Pantai Santolo, melainkan banyak 'spot' (titik) wisata yang indah, asri, dan memiliki nilai ekonomi di sektor pariwisata. Lagi pula jangan memandang sempit kepariwisataan, karena bukan melingkupi obyek wisata alam saja, jangan lupa kekayaan kuliner, kesenian, arsitektur prasejarah, sejarah bahkan kontemporer, yang memiliki daya tarik bagi parawisatawan untuk berkunjung dan berlama-lama di Jawa Barat.

Berdasarkan data Jawa Barat memiliki kurang lebih 350 obyek wisata. Bahkan setiap obyek wisata memiliki lebih dari satu potensi, yakni sumber daya alam mulai dari gunung, rimba, laut, air, pantai dan seni budaya. Kelima potensi alam dan satu hasil budaya (kearifan lokal) menjadi inti bisnis pariwisata di Jawa Barat. Melalui kelima tersebut sudah seharusnya, Pendapatan Asli Daerah pun bertambah mulai dari retribusi, dan pajak restoran, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya.

Namun apa sih Pariwisata itu? Dan tentunya apabila dihubungkan dengan nilai ekonomi sudah tentu membicarakan uang, penghasil uang alias industri. Jadi Pariwisata sebagai industri adalah sesuatu yang harus digali oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Wisata memiliki banyak definisi, menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000:46-47) menjelaskan pariwisata

adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Berbeda dengan H. Kodhyat (1983:4) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sementara dapat yang dikemukakan oleh Yoeti, (1991:103), pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "Tour". Dari ketiga definisi para ahli tersebut dapat diambil satu benang merah, yakni perpindahan individu ataupun kelompok manusia dari satu daerah ke daerah yang untuk mendapatkan kepuasan lahir maupun batin..

Atau jika dilihat dari UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan pada Pasal 1 ayat/butir 9 disebutkan Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dari

definisi di atas penyelenggaraan pariwisata dapat diartikan sebagai komponen-komponen yang menunjang sebuah obyek wisata mulai dari industri kerajinan, perhotelan, angkutan dan lain sebagainya. Sehingga dari penjelasan tersebut sudah semakin terlihat potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, melalui retribusi dan pajak.

Pemerintah Daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengolah berbagai potensi daerahnya termasuk salah satunya obyek dan daya tarik wisata. Kebebasan tersebut tiada lain adalah dengan jaminan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari kedua UU tersebut Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, lugas dan bertanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan keberadaan pariwisata daerah, Propinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain di sektor pertanian, kehutanan, industri, pariwisata dan pertambangan. (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2012). Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor pendongkrak ekonomi Jawa Barat yang sedang lesu dan dinilai dapat menjadi pendukung besar bagi pendapatan di Jawa Barat. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, jumlah wisatawan yang mengunjungi Jawa Barat pada tahun 2014

sekitar 45 juta orang dan berpotensi untuk mengalami penambahan jumlah wisatawan di tahun-tahun berikutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kunjungan wisatawan terkait pariwisata di Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah wisata lain seperti Bali. Perbaikan infrastruktur dan pengelolaan objek wisata yang baik dapat menjadi salah satu cara menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Barat. Disamping itu, Walikota Bandung pun sedang mencanangkan program ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata untuk menyiapkan masyarakat pariwisata. Dengan terciptanya masyarakat pariwisata diharapkan masyarakat menjadi lebih terdorong untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Jawa Barat (Fokus Jawa Barat, September 2016).

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah melalui retribusi yang didapatkan dari masing-masing obyek pariwisata di tiap daerah. Terobosan dimaksud salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas dan obyek-obyek kepariwisataan yang baru di Jawa Barat. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah terutama retribusi obyek wisata dan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya, sehingga nantinya dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

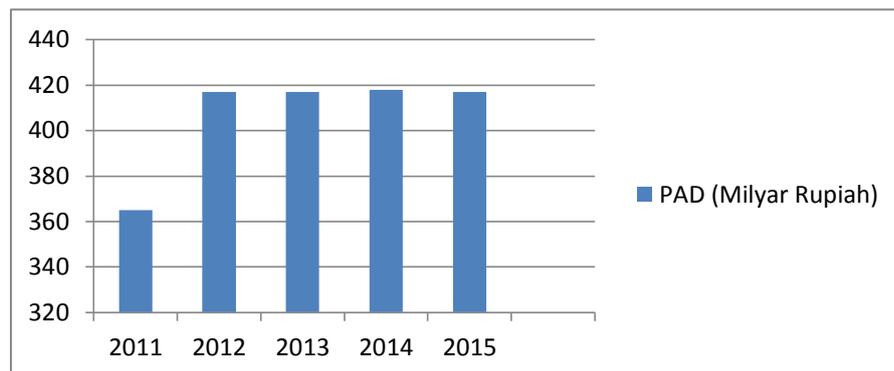
Jadi pariwisata sebagai industri adalah sesuatu yang harus digali oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Apabila pariwisata dihubungkan dengan nilai ekonomi sudah tentu membicarakan uang, penghasil uang atau industri. Sudah seharusnya, Pendapatan asli Daerah pun bertambah mulai dari retribusi, dan pajak restoran, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya. Berikut tabel dan grafik Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015.

**Tabel 1.1 Pendapatn Asli Daerah Pariwisata
Jawa Barat Tahun 2011-2015**

Tahun	PAD (Rupiah)
2011	365.689.539.567
2012	417.930.754.626
2013	417.184.938.798
2014	418.242.424.521
2015	417.231.938.798

Sumber : BPS dan Disparbud Jawa Barat

**Grafik 1.1 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
di Jawa Barat Tahun 2011-2015**



Sumber : BPS dan Disparbud Jawa Barat

Dapat kita lihat dari grafik diatas bahw pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Jawa Barat pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Pendapatan yang paling besar dialami pada tahun 2014 yaitu senilai Rp. 418.242.424.521 dan pendapatan yang sangat rendah dialami pada tahun 2011 yaitu senilai Rp. 365.689.539.567.

Sektor pariwisata didukung oleh peranan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat sebagai penunjang besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Jawa Barat. Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata yang ada di Jawa Barat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) karena setiap obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah akan memungut pembayaran atas pelayanan tempat pariwisata (retribusi). Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk dalam objek retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi dan badan yang menikmati jasa pemakaian sarana dan prasarana rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini dapat digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikur dari pemakaian fasilitas yang disediakan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian. Untuk obyek-obyek wisata yang ada di Jawa Barat, tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pengunjung

obyek wisata tersebut. Tarif retribusi ditinjau secara berkala paling lama tiga tahun sekali, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Berikut data pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Jawa Barat pada Tahun 2011-2015.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Jawa Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Wisatawan		Jumlah	Pertumbuhan
	Mancanegara	Domestik		
2011	1.333.512	35.315.020	36.648.532	-
2012	1.905.378	42.758.963	44.663.441	22%
2013	1.004.301	45.563.179	46.567.480	4%
2014	1.962.639	47.992.088	49.954.727	7%
2015	2.027.629	56.334.706	58.362.335	17%

Sumber: BPS Jawa Barat (2016)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat selama lima tahun terakhir dari tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2013 pertumbuhan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan yang sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya mengalami peningkatan sebesar 4%. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Jawa Barat mengalami peningkatan kembali sebesar 17%. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut adalah hasil kerja keras dari pemerintah Jawa Barat dalam meningkatkan pengembangan sektor kepariwisataan di Jawa Barat termasuk dalamnya kegiatan promosi dan marketing kepariwisataan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siapkan 16 destinasi pariwisata unggulan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2018 sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Sejumlah daerah favorit yang menjadi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara di Jawa Barat, adalah wilayah Bandung Raya seperti Kota Bandung dan sekitarnya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi dan Bogor. Keberadaan objek wisata baru yakni Taman Bumi atau Geopark Park Ciletuh, di kabupaten Sukabumi yang baru dibuka beberapa tahun lalu ternyata menjadi primadona wisata baru untuk Provinsi Jawa Barat. Selama tahun 2016 Jawa Barat teratas dalam kunjungan wisatawan Nusantara. Namun untuk tahun ini, Jawa Barat kembali tidak masuk dalam Program 10 Destinasi Prioritas Pariwisata yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Ini merupakan untuk ketiga kalinya Jawa Barat tidak masuk program tersebut. Hal tersebut disebabkan kegiatan wisata juga event seni budaya masih belum mendapat dukungan pemerintah kota maupun kabupaten dan bahkan dari tingkat provinsi.

Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti penginapan, fasilitas rekreasi, tempat dan atraksi wisata, merupakan aset pariwisata yang besar dan dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan sektor pariwisata bagi Jawa Barat. Berikut merupakan salah satu fasilitas yang memadai bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata yaitu hotel atau tempat untuk menginap dapat dilihat di tabel 1.3 yaitu jumlah kamar hotel yang tersedia di Jawa barat.

**Tabel 1.3 Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang
di Jawa Barat Tahun 2011-2015**

Tahun	Hotel		Jumlah
	Bintang	Non Bintang	
2011	20.358	25.214	45.572
2012	22.249	25.324	47.573
2013	22.433	25.784	48.217
2014	22.433	25.784	48.217
2015	20.603	24.582	45.185

Sumber : BPS Jawa Barat

Hotel berfungsi bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Di tahun 2015 jumlah kamar hotel bintang maupun non bintang di Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

Jawa Barat memiliki kurang lebih 350 obyek wisata. Bahkan setiap obyek wisata memiliki lebih dari satu potensi, yakni sumber daya alam mulai dari gunung, rimba, laut, air, pantai dan seni budaya. Kelima potensi alam dan satu hasil budaya (kearifan lokal) menjadi inti bisnis pariwisata di Jawa Barat. Melalui kelima tersebut sudah seharusnya, Pendapatan asli Daerah pun bertambah mulai dari retribusi, dan pajak restoran, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya. Apabila pariwisata dihubungkan dengan nilai ekonomi sudah tentu membicarakan uang, penghasil uang atau industri. Jadi pariwisata sebagai industri adalah sesuatu yang harus digali oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut data jumlah obyek wisata yang ada di Jawa Barat Tahun 2011-2015.

**Tabel 1.4 Jumlah Obyek Wisata di
Jawa Barat Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah Obyek Wisata
2011	517
2012	614
2013	587
2014	587
2015	628

Sumber : Disparbud Jawa Barat

Dapat di lihat dari tabel 1.4 jumlah obyek wisata di Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013-104 jumlah obyek wisata yang ada di jawa barat berkurang dibandingka dengan tahun tahun sebelumnya.

Sektor pariwisata di Jawa Barat dapat menjadi andalan untuk menggerakan sektor perekonomian, selama masyarakatnya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalisasi potensi kebudayaan. Jawa Barat sangat berpotensi besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan asli daerah (PAD).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah :

**“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA PADA TAHUN 2011-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 tentang penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemma dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah pusat tidak lagi mengatur, mendominasi pemerintah dan masyarakat daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Jawa Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat melalui semakin bertambahnya jumlah obyek wisata di Jawa Barat sampai pada tahun 2015 dan berbagai macam jenis obyek wisata seperti bangunan bersejarah dan masih banyak lagi. Namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sektor pariwisata Jawa Barat. Oleh karena itu perlu diadakan studi mengenai analisis pendapatan daerah sektor pariwisata kabupaten/kota di Jawa Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Apakah Jumlah Wisatawan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?

2. Apakah Jumlah Obyek Wisata mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?
3. Apakah Tingkat Penghunian Kamar Hotel mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
2. Menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
3. Menganalisis pengaruh tingkat penghunian kamar hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan pemerintah daerah khususnya dari sektor pariwisata.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain.